



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 279-286

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Ekosentrisme dalam Perspektif Sosial-Ekologis: Sinergi antara Manusia dan Alam

Sania Citra Alfifah

Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Program Pascasarjana, Universitas Mataram

alfifahcitra96@gmail.com

Abstrak

Krisis lingkungan global yang semakin nyata, seperti perubahan iklim, deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati, serta pencemaran air dan tanah, menunjukkan adanya ketidakseimbangan hubungan antara manusia dan alam. Kondisi ini banyak dipengaruhi oleh paradigma antroposentris yang menempatkan manusia sebagai pusat utama dan alam sebagai objek pemanfaatan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji ekosentrisme dalam perspektif sosial-ekologis sebagai pendekatan alternatif dalam membangun hubungan yang lebih harmonis antara manusia dan alam. Metode yang digunakan yaitu penelitian kualitatif melalui studi literatur dengan mengkaji berbagai jurnal, buku dan referensi ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa ekosentrisme memandang manusia sebagai bagian integral dari ekosistem sehingga seluruh komponen alam memiliki nilai intrinsik yang harus dihargai, bukan hanya semata-mata berdasarkan manfaat ekonominya. Dalam perspektif sosial-ekologis, keberlanjutan lingkungan tidak dapat dipisahkan dari sistem sosial, budaya, ekonomi, dan kebijakan yang membentuk perilaku manusia terhadap alam. Sinergi antara manusia dan alam diwujudkan melalui prinsip keseimbangan, tanggung jawab moral, resiliensi sosial-ekologis, serta pemanfaatan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam. Implementasi ekosentrisme dalam kehidupan sosial dapat dilakukan melalui transformasi kesadaran ekologis, integrasi nilai-nilai lingkungan dalam budaya masyarakat, pembangunan ekonomi berkelanjutan, serta partisipasi kolektif dalam pengelolaan lingkungan, dengan demikian ekosentrisme menjadi landasan penting dalam menciptakan sistem kehidupan yang berkelanjutan dan adil secara ekologis bagi generasi sekarang maupun mendatang.

Kata kunci: Ekosentrisme, Perspektif Sosial-Ekologis, Keberlanjutan Lingkungan, Hubungan Manusia Dan Alam, Kesadaran Ekologis

1. Latar Belakang

Krisis lingkungan global semakin eksis menunjukkan dampaknya atas ketidakseimbangan hubungan antara manusia dan alam, yang menunjukkan dampaknya atas ketidakseimbangan hubungan antara manusia dan alam (Folke et al., 2021). Fenomena ini tidak lagi bersifat lokal atau parsial, melainkan telah berkembang menjadi persoalan global yang memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Perubahan iklim yang ditandai dengan peningkatan suhu rata-rata bumi, mencairnya es di kutub, serta meningkatnya frekuensi bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan badai tropis menjadi bukti nyata bahwa sistem bumi sedang mengalami tekanan yang serius. Selain itu, degradasi hutan akibat deforestasi yang masif, hilangnya keanekaragaman hayati yang semakin cepat, serta pencemaran air dan tanah akibat aktivitas industri dan domestik memperlihatkan bahwa hubungan antara manusia dan alam berada dalam kondisi yang tidak seimbang.

Fenomena seperti perubahan iklim, degradasi hutan, hilangnya keanekaragaman hayati, serta pencemaran air dan tanah merupakan dampak nyata dari pola interaksi yang eksploitatif, perubahan dalam aktivitas manusia turut membentuk kondisi lingkungan dan mempercepat degradasi ekosistem secara global (IPBES, 2022). Aktivitas manusia yang didorong oleh kebutuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, dan perkembangan teknologi sering kali mengabaikan daya dukung lingkungan. Eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan tanpa mempertimbangkan keberlanjutan telah menyebabkan rusaknya ekosistem yang sebelumnya mampu menopang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dalam jangka panjang, kondisi ini tidak hanya mengancam keberlanjutan lingkungan, tetapi juga mengancam stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Hal ini menimbulkan paradigma pembangunan yang menitikberatkan asas antroposentris, yaitu sebuah perspektif yang memposisikan peran manusia sebagai pusat dan pengendali alam, sementara itu alam sendiri

dianggap sebagai sumber daya yang dimanfaatkan hanya untuk memenuhi kehidupan manusia (Keraf, 2010). Paradigma ini telah lama mendominasi cara pandang manusia dalam mengelola lingkungan, terutama sejak era revolusi industri. Dalam perspektif antroposentris, keberhasilan pembangunan sering kali diukur dari pertumbuhan ekonomi, peningkatan produksi, dan eksploitasi sumber daya alam yang maksimal. Akibatnya, alam dipandang sebagai objek yang dapat dikendalikan dan dimanfaatkan tanpa batas selama memberikan keuntungan bagi manusia.

Akibat dari paradigma tersebut, eksploitasi berlebihan terhadap alam dianggap sebagai konsekuensi yang wajar selama mampu meningkatkan kualitas hidup manusia. Aktivitas seperti penebangan hutan secara besar-besaran, pertambangan tanpa memperhatikan aspek lingkungan, serta penggunaan bahan kimia dalam pertanian menjadi praktik umum yang dianggap sah dalam kerangka pembangunan ekonomi. Namun demikian, pendekatan ini mengabaikan dampak jangka panjang terhadap lingkungan. Kerusakan ekosistem yang terjadi tidak hanya berdampak pada lingkungan itu sendiri, tetapi juga berimbas pada kehidupan manusia, seperti menurunnya kualitas air, berkurangnya kesuburan tanah, serta meningkatnya risiko bencana alam.

Kondisi ini memicu kegagalan dalam mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem dan menggeser kepentingan ekologis demi keuntungan jangka pendek manusia. Dalam banyak kasus, keputusan pembangunan lebih didasarkan pada kepentingan ekonomi sesaat tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap generasi mendatang. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologis dalam proses pembangunan. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka keberlanjutan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya akan semakin terancam.

Untuk merespon kondisi tersebut, pendekatan ekosentrisme lahir sebagai suatu perspektif dalam etika lingkungan dengan memposisikan manusia sebagai bagian integral dari alam. Pendekatan ini menawarkan cara pandang yang berbeda dari paradigma antroposentris dengan menekankan bahwa manusia bukanlah pusat dari segala kehidupan, melainkan bagian dari sistem ekologis yang lebih luas. Artinya, manusia memiliki keterkaitan yang erat dengan alam dan tidak dapat dipisahkan darinya. Dengan demikian, setiap tindakan manusia terhadap lingkungan akan berdampak pada keseimbangan ekosistem secara keseluruhan.

Artinya, keseluruhan ekosistem baik biotik dan abiotik memiliki nilai intrinsik, bukan hanya bernilai jika ada manfaatnya bagi manusia (Naess, 1973). Pandangan ini menegaskan bahwa alam memiliki nilai yang melekat pada dirinya sendiri, terlepas dari manfaat yang dapat diberikan kepada manusia. Oleh karena itu, manusia memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga dan melestarikan lingkungan sebagai bagian dari sistem kehidupan yang lebih luas. Dalam konteks ini, hubungan antara manusia dan alam harus didasarkan pada prinsip saling menghormati dan menjaga keseimbangan.

Oleh karena itu, sinergi antara manusia dan alam harus berasaskan pada keseimbangan, saling ketergantungan, dan tanggung jawab moral. Sinergi ini tidak hanya mencakup aspek ekologis, tetapi juga melibatkan dimensi sosial dan budaya. Manusia perlu menyadari bahwa keberlangsungan hidupnya sangat bergantung pada kondisi lingkungan yang sehat. Dengan demikian, upaya pelestarian lingkungan tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga tanggung jawab kolektif seluruh masyarakat.

Dalam perspektif sosial-ekologis, ekosentrisme dipandang sebagai kerangka analisis yang menggabungkan beberapa aspek seperti sosial, ekonomi, dan ekologi untuk memahami interaksi manusia dan alam. Pendekatan ini menekankan bahwa permasalahan lingkungan tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan ekonomi yang melatarbelakanginya. Oleh karena itu, solusi terhadap permasalahan lingkungan harus mempertimbangkan berbagai aspek tersebut secara holistik.

Menurut Berkes (2012), pendekatan ini berfokus pada permasalahan lingkungan yang tidak bisa lepas dari struktur sosial, budaya, dan sistem ekonomi yang membentuk perilaku manusia terhadap alam. Dengan kata lain, kerusakan lingkungan bukan hanya disebabkan oleh faktor ekologis, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial seperti ketimpangan ekonomi, pola konsumsi, serta kebijakan pembangunan yang tidak berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pelestarian lingkungan harus melibatkan perubahan dalam sistem sosial dan ekonomi yang ada.

Bisa dikatakan kerusakan lingkungan tidak hanya tentang persoalan ekologis, namun juga sebuah cerminan dari kesenjangan sosial dan pola pembangunan yang tidak berkelanjutan. Dalam banyak kasus, eksploitasi sumber

daya alam dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi kelompok tertentu, sementara dampaknya dirasakan oleh masyarakat luas, terutama kelompok yang rentan. Hal ini menimbulkan ketidakadilan ekologis yang semakin memperburuk kondisi lingkungan dan sosial.

Konsep sosial-ekologis menitikberatkan keterkaitan antara sistem sosial manusia dan sistem ekologi alam yang membentuk satu kesatuan kompleks. Artinya, setiap adanya perubahan oleh satu komponen maka akan mempengaruhi komponen lainnya. Interaksi antara manusia dan alam bersifat dinamis dan saling memengaruhi, sehingga perubahan dalam satu aspek akan berdampak pada aspek lainnya.

Contohnya praktek alih fungsi lahan dan deforestasi untuk kepentingan ekonomi menyebabkan degradasi lingkungan yang akhirnya akan berdampak pada kehidupan sosial masyarakat (Folke et al., 2010). Deforestasi tidak hanya menyebabkan hilangnya habitat bagi berbagai spesies, tetapi juga berdampak pada perubahan iklim lokal, berkurangnya sumber air, serta menurunnya kualitas hidup masyarakat yang bergantung pada hutan. Hal ini menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan memiliki dampak yang luas dan kompleks.

Hal ini menunjukkan bahwa keberlanjutan lingkungan sangat terikat pada kemampuan manusia dalam mengelola hubungan tersebut dengan bijaksana. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan memerlukan pemahaman yang mendalam tentang keterkaitan antara aspek ekologis, sosial, dan ekonomi. Tanpa adanya pengelolaan yang bijaksana, maka kerusakan lingkungan akan terus berlanjut dan semakin sulit untuk diperbaiki.

Ekosentrisme dalam perspektif sosial-ekologis mengusulkan sebuah pendekatan alternatif dalam pengelolaan sumber daya alam dengan mengutamakan prinsip keberlanjutan, keadilan ekologis, dan partisipasi masyarakat. Pendekatan ini menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan serta perlunya mempertimbangkan aspek keadilan dalam distribusi manfaat sumber daya alam.

Pendekatan ini dinilai mampu mendorong perubahan perilaku manusia yang awalnya bersifat eksploitatif menjadi lebih konservatif. Dengan adanya kesadaran bahwa manusia merupakan bagian dari alam, maka diharapkan muncul perilaku yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Hal ini dapat diwujudkan melalui berbagai upaya seperti pengurangan penggunaan sumber daya yang berlebihan, pengelolaan limbah yang lebih baik, serta penerapan teknologi ramah lingkungan.

Dalam konteks ini, pengetahuan lokal (local wisdom) dan praktik sosial masyarakat adat merepresentasikan nilai-nilai ekosentris yang sudah lama diimplementasikan dalam menjaga keseimbangan alam (Gadgil et al., 1993). Masyarakat adat memiliki hubungan yang erat dengan alam dan telah mengembangkan berbagai praktik pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Praktik-praktik ini dapat menjadi sumber inspirasi dalam mengembangkan pendekatan pengelolaan lingkungan yang lebih berkelanjutan.

Namun demikian, ekosentrisme masih menghadapi tantangan dari ekonomi global, industrialisasi, serta kebijakan pembangunan yang masih belum sepenuhnya berpihak kepada alam. Tekanan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sering kali menjadi alasan utama dalam mengabaikan aspek lingkungan. Selain itu, globalisasi juga mendorong eksploitasi sumber daya alam secara lebih intensif.

Sehingga diperlukannya sinergi dari berbagai pihak seperti pemerintah, masyarakat, akademisi, dan sektor swasta untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip ekosentris dalam perencanaan dan pengelolaan lingkungan. Kolaborasi ini penting untuk menciptakan kebijakan dan praktik yang mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian lingkungan.

Oleh karena itu, kajian mengenai ekosentrisme dalam perspektif sosial-ekologis sangat penting untuk dikembangkan guna membangun hubungan antara manusia dan alam yang lebih harmonis. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan konsep dan praktik pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Sinergi ini diharapkan mampu menciptakan sistem kehidupan yang berkelanjutan, yang mana kebutuhan manusia tetap terpenuhi dengan berlandaskan asas konservasi agar kelestarian lingkungan tetap terjaga untuk generasi mendatang. Dengan demikian, upaya untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan alam bukan hanya menjadi kebutuhan saat ini, tetapi juga menjadi investasi bagi masa depan kehidupan di bumi.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Studi literatur merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji secara kritis, sistematis, dan mendalam berbagai sumber pustaka yang relevan dengan topik yang diteliti. Sumber-sumber tersebut meliputi jurnal ilmiah, buku akademik, artikel penelitian, laporan ilmiah, serta dokumen lain yang memiliki keterkaitan dengan konsep ekosentrisme dan perspektif sosial-ekologis. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman konseptual yang komprehensif serta memungkinkan penulis untuk mengintegrasikan berbagai pandangan teoritis yang telah dikembangkan oleh para ahli sebelumnya (Milya Sari dan Asmendri, 2020).

Penelitian ini dirancang secara sistematis dengan beberapa tahapan, yaitu pengumpulan data, seleksi literatur, analisis data, dan sintesis informasi. Pada tahap pengumpulan data, penulis menelusuri berbagai sumber literatur melalui basis data ilmiah terpercaya, baik nasional maupun internasional. Selanjutnya, pada tahap seleksi, penulis melakukan penyaringan terhadap literatur yang relevan berdasarkan kriteria tertentu, seperti kesesuaian topik, kredibilitas sumber, serta tahun publikasi agar informasi yang diperoleh tetap mutakhir dan valid.

Tahap berikutnya adalah analisis data, yang dilakukan dengan menggunakan teknik analisis isi (content analysis). Dalam tahap ini, penulis mengidentifikasi, mengkategorikan, dan menginterpretasikan berbagai konsep, teori, serta temuan penelitian yang berkaitan dengan ekosentrisme dan hubungan sosial-ekologis. Analisis ini bertujuan untuk menemukan pola, hubungan, serta kesenjangan dalam kajian yang telah ada. Selanjutnya, hasil analisis tersebut disintesis untuk membangun kerangka pemikiran yang utuh dan terintegrasi.

Adapun sumber literatur yang digunakan dalam penulisan artikel ini berasal dari jurnal-jurnal terindeks dan terintegrasi yang diperoleh dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga layak dijadikan sebagai referensi ilmiah. Seluruh data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara mendalam untuk menghasilkan kesimpulan yang relevan dengan tujuan penelitian. Dengan demikian, metode ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai konsep ekosentrisme dalam perspektif sosial-ekologis serta implikasinya terhadap keberlanjutan lingkungan..

3. Hasil dan Diskusi

1. Ekosentrisme dalam perspektif sosial-ekologis

Ekosentrisme merupakan salah satu pendekatan dalam etika lingkungan yang menempatkan alam sebagai pusat nilai, bukan sekadar sebagai objek yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Dalam pandangan ini, manusia tidak lagi diposisikan sebagai entitas yang dominan atau penguasa tunggal atas alam, melainkan sebagai bagian dari sistem ekologis yang lebih luas dan saling terhubung. Cara pandang ini menuntut adanya perubahan mendasar dalam memahami relasi manusia dengan lingkungan, dari relasi yang bersifat eksploitatif menjadi relasi yang lebih setara dan harmonis. Perspektif ekosentrisme berkembang sebagai respons terhadap krisis lingkungan global yang semakin kompleks, yang sebagian besar dipicu oleh paradigma antroposentris yang menempatkan kepentingan manusia di atas segala-galanya (Naess, 1973). Paradigma antroposentris telah mendorong eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran, sering kali tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap keseimbangan ekosistem.

Dalam konteks sosial, ekosentrisme tidak hanya membahas hubungan manusia dengan alam dari sisi ekologis semata, tetapi juga mengkaji interaksi yang lebih kompleks antara sistem sosial dan sistem lingkungan. Pendekatan sosial-ekologis memandang bahwa kehidupan manusia dan kondisi lingkungan berada dalam hubungan yang saling memengaruhi dan membentuk suatu sistem yang dinamis serta tidak dapat dipisahkan (Berkes & Folke, 1998). Hal ini berarti bahwa setiap aktivitas manusia, baik dalam bidang ekonomi, budaya, maupun kebijakan publik, memiliki konsekuensi ekologis yang nyata. Sebaliknya, perubahan dalam kondisi lingkungan juga akan memengaruhi struktur sosial, pola kehidupan, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, hubungan antara manusia dan alam bukanlah hubungan satu arah, melainkan hubungan timbal balik yang kompleks.

Salah satu inti utama dari ekosentrisme adalah pengakuan terhadap nilai intrinsik alam. Artinya, alam memiliki nilai yang melekat pada dirinya sendiri, terlepas dari manfaat yang dapat diberikan kepada manusia. Pandangan ini berbeda secara mendasar dengan pendekatan utilitarian yang cenderung melihat alam hanya sebagai sumber

daya ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam kerangka ekosentrisme, setiap komponen alam, baik makhluk hidup maupun unsur non-hayati, memiliki nilai yang patut dihormati. Menurut Keraf (2010), ekosentrisme mengajarkan bahwa manusia memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga keberlanjutan alam karena manusia merupakan bagian integral dari ekosistem tersebut. Oleh karena itu, hubungan antara manusia dan alam seharusnya bersifat timbal balik, di mana manusia tidak hanya mengambil manfaat, tetapi juga memberikan perlindungan dan menjaga keseimbangan lingkungan.

Dalam perspektif sosial-ekologis, hubungan ini dapat dipahami sebagai bentuk ko-evolusi antara manusia dan alam. Ko-evolusi mengacu pada proses di mana sistem sosial dan sistem ekologis berkembang secara bersamaan dan saling memengaruhi. Perubahan dalam aktivitas manusia, seperti intensifikasi pertanian atau pembangunan industri, akan memengaruhi kondisi lingkungan. Sebaliknya, perubahan lingkungan seperti degradasi tanah atau perubahan iklim akan berdampak pada sistem sosial, termasuk pada pola produksi, mata pencaharian, dan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, praktik pertanian intensif yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan dapat menyebabkan penurunan kualitas tanah, yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya produktivitas pertanian itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa keberlanjutan sistem sosial sangat bergantung pada keberlanjutan sistem ekologis (Folke et al., 2005).

Lebih jauh lagi, pendekatan ekosentrisme dalam kerangka sosial-ekologis juga menekankan pentingnya konsep resiliensi, yaitu kemampuan suatu sistem untuk bertahan, beradaptasi, dan pulih dari gangguan atau perubahan. Dalam sistem sosial-ekologis, resiliensi tidak hanya ditentukan oleh kondisi lingkungan, tetapi juga oleh kapasitas masyarakat dalam merespons perubahan tersebut. Masyarakat yang memiliki kemampuan adaptasi yang baik cenderung lebih mampu menghadapi tekanan lingkungan, baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun aktivitas manusia. Salah satu faktor yang mendukung resiliensi ini adalah keberadaan pengetahuan lokal atau kearifan tradisional dalam pengelolaan sumber daya alam.

Masyarakat yang memiliki pengetahuan lokal tentang lingkungan biasanya memiliki cara-cara yang lebih berkelanjutan dalam memanfaatkan sumber daya alam. Mereka memahami batas-batas ekologis serta memiliki mekanisme sosial untuk menjaga keseimbangan alam. Sebaliknya, masyarakat yang sepenuhnya bergantung pada teknologi modern tanpa mempertimbangkan aspek ekologis sering kali menghadapi risiko kerusakan lingkungan yang lebih besar (Berkes, 2008). Kearifan lokal ini menjadi salah satu bentuk nyata penerapan prinsip ekosentrisme dalam kehidupan masyarakat.

Banyak komunitas tradisional yang telah lama menerapkan praktik pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Contohnya adalah sistem agroforestri yang menggabungkan pertanian dengan pelestarian hutan, larangan penebangan pohon di wilayah tertentu yang dianggap sakral, serta pengelolaan sumber air berbasis komunitas. Praktik-praktik tersebut mencerminkan pemahaman bahwa manusia dan alam memiliki hubungan yang tidak terpisahkan. Dalam sistem ini, eksploitasi yang berlebihan tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam keberlangsungan hidup masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian dan keseimbangan menjadi dasar dalam pengelolaan sumber daya alam.

Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat menjadi faktor yang sangat penting dalam memastikan keberhasilan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Ketika masyarakat dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan lingkungan, mereka cenderung memiliki rasa memiliki dan tanggung jawab yang lebih besar terhadap kelestarian alam (MEA, 2005). Partisipasi masyarakat juga memungkinkan terciptanya solusi yang lebih sesuai dengan kondisi lokal, karena masyarakat memiliki pengetahuan langsung tentang lingkungan tempat mereka tinggal.

Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan ekosentrisme tidak hanya bergantung pada kebijakan atau teknologi, tetapi juga pada perubahan pola pikir dan kesadaran manusia terhadap alam. Selama manusia masih memandang alam sebagai objek eksploitasi yang dapat dimanfaatkan tanpa batas, maka kerusakan lingkungan akan terus berlanjut. Sebaliknya, jika manusia mampu memandang dirinya sebagai bagian dari ekosistem yang saling bergantung, maka akan terbuka peluang untuk menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara manusia dan alam.

Dengan demikian, ekosentrisme tidak hanya menjadi sebuah konsep dalam etika lingkungan, tetapi juga menjadi landasan penting dalam membangun sistem sosial-ekologis yang berkelanjutan. Pendekatan ini mengajak manusia untuk kembali memahami posisinya dalam alam, serta mengembangkan hubungan yang lebih seimbang

dan bertanggung jawab. Dalam menghadapi berbagai tantangan lingkungan global saat ini, penerapan prinsip-prinsip ekosentrisme menjadi semakin relevan sebagai upaya untuk menjaga keberlangsungan kehidupan, baik bagi manusia maupun bagi seluruh makhluk hidup yang ada di bumi.

2. Sinergi Antara Manusia dan Alam

Sinergi antara manusia dan alam dapat dipahami sebagai hubungan timbal balik yang tidak sekedar bersifat fungsional, namun juga etis dan ekologis. Dalam hubungan ini, manusia tidak hanya mengambil manfaat dari alam, melainkan juga menjaga kondisi yang memungkinkan alam tetap menjalankan fungsinya. Sinergi semacam ini tidak muncul begitu saja melainkan terbentuk dari kesadaran bahwa keberlangsungan hidup manusia sangat bergantung pada kesehatan ekosistem. Ketika relasi ini berjalan seimbang, maka tercipta kondisi dimana kebutuhan manusia dapat terpenuhi tanpa mengorbankan stabilitas lingkungan. Dalam kerangka sosial-ekologis, sinergi ini dipandang sebagai interaksi dinamis antara sistem sosial dan sistem ekologis. Kedua sistem tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling memengaruhi dalam berbagai skala, baik lokal maupun global. Aktivitas manusia seperti pertanian, industri, dan pembangunan infrastruktur secara langsung mengubah kondisi lingkungan. Sebaliknya, perubahan lingkungan seperti degradasi tanah atau perubahan iklim akan mempengaruhi pola hidup, ekonomi, dan bahkan struktur sosial masyarakat (Berkes & Folke, 1998). Dari sini terlihat bahwa menjaga keseimbangan antara manusia dan alam bukan hanya sekedar persoalan lingkungan, tetapi juga persoalan keberlanjutan sosial.

Sinergi antara manusia dan alam menuntut adanya perubahan cara pandang terhadap sumber daya alam. Alam tidak lagi diposisikan sebagai objek yang dapat dimanfaatkan tanpa batas, tetapi sebagai sistem yang memiliki kapasitas tertentu. Pemanfaatan yang melampaui kapasitas ini akan mengganggu keseimbangan ekosistem dan pada akhirnya merugikan manusia itu sendiri. Dalam konteks ini, Daly (1996) menegaskan bahwa aktivitas ekonomi harus berada dalam batas daya dukung lingkungan. Artinya, pertumbuhan tidak boleh mengorbankan kemampuan alam untuk memulihkan dirinya. Namun, dalam konteks modern, sinergi antara manusia dan alam menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah tekanan ekonomi yang mendorong eksploitasi sumber daya secara berlebihan. Globalisasi dan perkembangan teknologi mempercepat proses ini, sehingga sering kali melampaui kemampuan alam untuk beradaptasi. Selain itu, adanya ketimpangan dalam distribusi manfaat sumber daya juga memicu konflik antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Dalam situasi seperti ini, diperlukan pendekatan yang tidak hanya mempertimbangkan efisiensi, tetapi juga keadilan dan keberlanjutan.

Sinergi yang berkelanjutan juga memerlukan dukungan dan kebijakan yang berpihak pada lingkungan. Regulasi mengatur pemanfaatan sumber daya harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan ekosistem. Hal ini tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada partisipasi masyarakat dan sektor swasta. Kolaborasi antara aktor menjadi penting karena pengelolaan lingkungan tidak dapat dilakukan secara parsial. Setiap pihak memiliki peran dalam menjaga keberlanjutan sistem sosial-ekologis. Disisi lain, dimensi etis dari sinergi ini tidak boleh diabaikan. Hubungan antara manusia dan alam bukan hanya soal bagaimana memanfaatkan sumber daya secara efisien, tetapi juga bagaimana menghargai keberadaan alam sebagai bagian dari kehidupan. Pada akhirnya, sinergi antara manusia dan alam merupakan proses yang terus berkembang. Ia tidak lagi bersifat statis, melainkan menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi sosial-ekologis. Tantangan yang dihadapi kedepan kemungkinan akan semakin kompleks, terutama dengan adanya perubahan iklim dan tekanan terhadap sumber daya alam. Oleh karena itu, diperlukannya kemampuan untuk terus belajar dan beradaptasi. Sinergi yang kuat bukan hanya tentang menjaga keseimbangan ini, tetapi juga memastikan bahwa sistem yang ada mampu bertahan menghadapi perubahan dimasa depan. Dengan demikian, sinergi antara manusia dan alam bukan sekedar konsep ideal, tetapi merupakan kebutuhan yang mendesak. Keberhasilan dalam membangun hubungan ini akan menentukan keberlanjutan kehidupan, tidak hanya bagi manusia, tetapi juga bagi seluruh makhluk hidup yang menjadi bagian dari ekosistem.

3. Implementasi Ekosentrisme dalam Kehidupan Sosial

Implementasi ekosentrisme dalam kehidupan sosial pada dasarnya merupakan upaya mentransformasikan cara pandang manusia terhadap alam dari relasi bersifat eksploitatif menjadi relasi yang bersifat ko-eksistensial. Dalam praktik sosial, implementasi ekosentrisme tidak hanya berbicara tentang perlindungan lingkungan secara teknis, tetapi juga menyangkut perubahan nilai, norma, dan struktur sosial. Hal ini karena krisis lingkungan pada dasarnya merupakan refleksi dari krisis cara pandang manusia terhadap alam. Oleh karena itu, penerapan

ekosentrisme harus dimulai dari perubahan kesadaran kolektif manusia. Adapun beberapa implementasi ekosentrisme yang bisa diterapkan pada kehidupan sosial yaitu :

a. Transformasi Kesadaran Ekologis dalam Kehidupan Sehari-hari

Salah satu bentuk paling mendasar dari implementasi ekosentrisme adalah transformasi kesadaran ekologis pada individu manusia dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran ini tercermin dalam cara manusia berinteraksi dengan lingkungan, seperti dalam pola konsumsi, penggunaan sumber daya, hingga memperlakukan makhluk hidup lainnya. Dalam perspektif *deep ecology*, manusia dipandang sebagai bagian integral dari sistem ekologis yang lebih luas, sehingga setiap individu memiliki konsekuensi terhadap keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Kesadaran ini mendorong munculnya perilaku yang lebih bertanggung jawab, seperti mengurangi limbah, menggunakan energi secara efisien, serta menghindari eksploitasi berlebihan terhadap alam. Selain itu, kesadaran ekologis juga harus melibatkan dimensi etis, dimana manusia mulai mempertimbangkan kepentingan makhluk non-manusia dalam setiap keputusan yang diambil. Dengan demikian, tindakan manusia tidak lagi semata-mata didasarkan kepentingan ekonomi atau utilitas, tetapi juga pada pertimbangan moral terhadap keberlanjutan ekosistem.

b. Integrasi Nilai Ekosentris dalam Struktur Sosial dan Budaya

Implementasi ekosentrisme dalam kehidupan sosial tidak dapat dilepaskan dari peran nilai-nilai budaya. Banyak masyarakat tradisional yang sebenarnya telah menerapkan prinsip-prinsip ekosentrisme melalui kearifan lokal, seperti menjaga hutan adat, melindungi sumber air, dan membatasi eksploitasi sumber daya alam. Dalam konteks ini, ekosentrisme dapat dilihat sebagai revitalisasi nilai-nilai lokal yang telah lama ada, tetapi mulai tergerus oleh modernisasi. Pandangan bahwa manusia harus hidup selaras dengan alam merupakan bentuk *ecosophy*, yaitu kebijaksanaan hidup yang menekankan keseimbangan antara manusia dan lingkungan (Keraf, 2002). Integrasi nilai ekosentris dalam budaya juga dapat dilakukan melalui pendidikan lingkungan, media, dan praktik sosial sehari-hari. Ketika nilai-nilai tersebut menjadi bagian dari norma sosial, maka perilaku ramah lingkungan tidak lagi dianggap sebagai pilihan individu, melainkan sebagai kewajiban sosial.

c. Penerapan Ekosentrisme dalam Sistem Ekonomi dan Pembangunan

Dalam kehidupan sosial modern, sistem ekonomi memiliki peran besar dalam menentukan bagaimana manusia berinteraksi dengan alam. Oleh karena itu, implementasi ekosentrisme juga harus menyentuh aspek ekonomi, terutama dalam konteks pembangunan. Ekosentrisme mendorong pergeseran dari paradigma pembangunan yang eksploitatif menuju pembangunan berkelanjutan. Pendekatan ini menuntut adanya keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kapasitas ekologis. Dengan kata lain, aktivitas ekonomi harus disesuaikan dengan daya dukung lingkungan. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa keberlangsungan satu bagian ekosistem bergantung pada kesejahteraan seluruh sistem. Dalam praktiknya, hal ini dapat diwujudkan melalui pengembangan ekonomi hijau, penggunaan teknologi ramah lingkungan, serta pengelolaan sumber daya alam yang berbasis keberlanjutan.

d. Peran Kolektif Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan

Implementasi ekosentrisme tidak dapat dilakukan secara individual semata, melainkan membutuhkan partisipasi kolektif masyarakat. Dalam perspektif sosial-ekologis, masyarakat dipandang sebagai aktor utama dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Partisipasi ini dapat berupa keterlibatan dalam kegiatan konservasi, pengelolaan sampah berbasis komunitas, hingga advokasi terhadap kebijakan lingkungan. Ketika masyarakat memiliki kesadaran dan tanggung jawab bersama terhadap lingkungan, maka upaya pelestarian akan menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, pendekatan partisipatif juga memungkinkan terciptanya solusi yang lebih kontekstual dan sesuai dengan kondisi lokal. Hal ini penting karena setiap wilayah memiliki karakteristik ekologis dan sosial yang berbeda.

4. Kesimpulan

Ekosentrisme dalam perspektif sosial-ekologis menegaskan bahwa manusia bukanlah pusat seluruh kehidupan melainkan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem ekologis yang lebih luas. Pandangan ini menjadi penting sebagai respon terhadap berbagai fenomena krisis lingkungan yang muncul akibat dominasi paradigma

antroposentris dan pola pembangunan yang eksploitatif. Ekosentrisme mengajarkan bahwa alam memiliki nilai intrinsik yang harus dihormati, sehingga hubungan manusia dengan lingkungan harus dibangun atas dasar keseimbangan, tanggung jawab moral, dan keberlanjutan. Dalam kerangka sosial-ekologis, keberlanjutan lingkungan sangat dipengaruhi oleh struktur sosial, budaya, ekonomi, dan kebijakanyang membentuk perilaku manusia terhadap alam. Oleh karena itu, sinergi antara manusia dan alam tidak cukup hanya melalui konservasiteknis, tetapi juga membutuhkan perubahan cara pandang, kesadaran kolektif, serta transformasi nilai dalam kehidupan sosial. Kearifan local, partisipasi masyarakat, dan pembangunan yang berorientasi pada daya dukung lingkungan menjadi bentuk nyata penerapan prinsip ekosentrisme. Implementasi ekosentrisme dalam kehidupan sosial menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dan sektor wisata. Ketika manusia mampu menempatkan dirinya sebagai bagian dari alam, maka peluang menciptakan hubungan yang harmonis dan berkeberlanjutan akan semakin besar. Dengan demikian, ekosentrisme bukannya hanya sebuah konsep etika lingkungan, tetapi juga menjadi landasan penting dalam menjaga keberlangsungan kehidupan dan keseimbangan ekosistem dimasa depan.

Referensi

1. Assessment, M. E. (2005). *Ecosystems and human well-being: wetlands and water*. World resources institute.
2. Berkes, F. (2012) *Sacred Ecology*. 3rd edn. New York: Routledge.
3. Berkes, F., & Folke, C. (1998). Linking social and ecological systems for resilience and sustainability. *Linking social and ecological systems: management practices and social mechanisms for building resilience*, 1(4), 4.
4. Berkes, F., 2008. *Sacred Ecology*. 2nd ed. New York: Routledge.
5. Daly, H. E. (1997). *Beyond growth: The economics of sustainable development*. Beacon press.
6. Folke, C., Carpenter, S. R., Walker, B., Scheffer, M., Chapin, T., & Rockström, J. (2010). Resilience thinking: integrating resilience, adaptability and transformability. *Ecology and society*, 15(4).
7. Folke, C., Hahn, T., Olsson, P., & Norberg, J. (2005). Adaptive governance of social-ecological systems. *Annu. Rev. Environ. Resour.*, 30, 441-473.
8. Gadgil, M., Berkes, F., & Folke, C. (1993). Indigenous knowledge for biodiversity conservation. *Ambio-Stockholm-*, 22, 151-151.
9. Keraf, A. S. (2010). *Etika lingkungan hidup*. Penerbit Buku Kompas.
10. Keraf, A.S. (2002) dalam kajian interaksi manusia dan lingkungan, dikutip dalam: Interaksi manusia dan lingkungan dalam perspektif ekosentrisme (2021)
11. Naess, A. (2017). The shallow and the deep, long-range ecology movement. A summary. In *The ethics of the environment* (pp. 115-120). Routledge.
12. Naess, A., 1973. The shallow and the deep, long-range ecology movement. *Inquiry*, 16(1-4), pp.95-100
13. Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian kepustakaan (library research) dalam penelitian pendidikan IPA. *Natural Science: Jurnal penelitian bidang IPA dan pendidikan IPA*, 6(1), 41-53.
14. Folke, C., Polasky, S., Rockström, J., Galaz, V., Westley, F., Lamont, M., Scheffer, M., Österblom, H., Carpenter, S. R., Chapin, F. S., & Seto, K. C. (2021). *Our future in the Anthropocene biosphere*. *Ambio*, 50(4), 834-869.
15. IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services). (2022). *Summary for policymakers of the global assessment report on biodiversity and ecosystem services*. IPBES Secretariat.